

TINDAKAN AFIRMATIF QUR'ANI SEBAGAI STRATEGI PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN BERKELANJUTAN DALAM PENCEGAHAN POLITIK DINASTI

Farhan Ahsan Anshari¹, Nur Arfiyah Febriani², Zainun Kamaludin Fakhri³

^{1,2,3}Universitas PTIQ Jakarta

ansharifarhan21@gmail.com¹, febriani@ptiq.ac.id², zainunkamal@gmail.com³

ABSTRAK

Fenomena politik dinasti di Indonesia telah menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi dan regenerasi kepemimpinan. Praktik ini berpotensi menutup kesempatan bagi individu yang layak memimpin, menghambat meritokrasi, serta menurunkan akuntabilitas pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep tindakan afirmatif Qur'ani sebagai strategi pendidikan kepemimpinan berkelanjutan dalam pencegahan politik dinasti. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), memanfaatkan sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, sumber sekunder berupa literatur akademik terkait politik dinasti dan pendidikan kepemimpinan. Analisis dilakukan dengan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) dan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip Qur'ani yang relevan dengan pencegahan politik dinasti. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan afirmatif Qur'ani, yang berlandaskan nilai keadilan, amanah, dan meritokrasi, dapat diimplementasikan secara efektif melalui pendidikan kepemimpinan berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya menyiapkan kader pemimpin yang kompeten dan berintegritas, tetapi juga membangun budaya politik yang sehat, sehingga politik dinasti dapat dicegah secara sistematis dan berkelanjutan. Temuan ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik pendidikan kepemimpinan berbasis nilai Qur'ani dalam konteks demokrasi modern.

Kata Kunci: Tindakan Afirmatif Qur'ani, Pendidikan Kepemimpinan Berkelanjutan, Politik Dinasti, Meritokrasi, Keadilan.

ABSTRACT

The phenomenon of dynastic politics in Indonesia has become a serious challenge to the quality of democracy and leadership regeneration. This practice has the potential to close opportunities for individuals worthy of leadership, hinder meritocracy, and reduce government accountability. This study aims to examine the concept of Qur'anic affirmative action as a strategy for sustainable leadership education in preventing dynastic politics. The study uses a qualitative approach with library research methods, utilizing primary sources in the form of relevant Qur'anic verses and secondary sources in the form of academic literature related to dynastic politics and leadership education. The analysis was conducted using thematic interpretation (maudhu'i) and content analysis methods to

identify Qur'anic principles relevant to preventing dynastic politics. The results of the study indicate that Qur'anic affirmative action, which is based on the values of justice, trustworthiness, and meritocracy, can be implemented effectively through sustainable leadership education. This strategy not only prepares competent and integrity-based leaders but also builds a healthy political culture, so that dynastic politics can be prevented systematically and sustainably. These findings are expected to contribute to the development of theory and practice of Qur'anic value-based leadership education in the context of modern democracy.

Keywords: *Quranic Affirmative Action, Continuing Leadership Education, Dynastic Politics, Meritocracy, Justice.*

A. PENDAHULUAN

Fenomena politik dinasti merupakan salah satu tantangan serius bagi demokrasi di Indonesia. Praktik ini umumnya ditandai oleh pewarisan kekuasaan secara turun-temurun dalam lingkup keluarga atau kerabat dekat, yang sering kali mengabaikan prinsip kompetisi politik yang sehat dan meritokrasi. Dalam banyak kasus, politik dinasti dapat melemahkan mekanisme *checks and balances*, memicu praktik korupsi, dan mempersempit ruang partisipasi politik masyarakat luas. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pernah memuat larangan politik dinasti, kebijakan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, dengan alasan pembatasan tersebut bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih.

Di Indonesia, praktik politik dinasti dapat dijumpai pada berbagai tingkat pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Beberapa kepala daerah yang telah menjabat dua periode kemudian digantikan oleh pasangan hidup, anak, atau kerabat dekat, sering kali dengan dukungan penuh dari mesin politik yang sama. Misalnya, di Provinsi Banten, kepemimpinan yang sebelumnya dipegang oleh Ratu Atut Chosiyah kemudian dilanjutkan oleh kerabat dekatnya. Fenomena serupa terjadi di Sulawesi Selatan, di mana beberapa keluarga politik mampu mempertahankan kekuasaan lintas periode dan lintas jabatan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa politik dinasti bukan hanya isu lokal, tetapi telah menjadi bagian dari kultur politik yang mengakar di banyak wilayah.¹

¹ Miftahuddin, "Politik Dinasti Perspektif Al-Qur'an (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/Puu-Xiii/2015)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2018), 8–9.

Dampak negatif politik dinasti tidak hanya terbatas pada persaingan politik yang timpang, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Penelitian dan laporan media menunjukkan bahwa beberapa daerah yang dikuasai oleh dinasti politik cenderung mengalami stagnasi pembangunan akibat rendahnya akuntabilitas dan minimnya inovasi kebijakan. Konsentrasi kekuasaan dalam lingkup keluarga sering kali menciptakan lingkungan yang rawan konflik kepentingan, di mana kebijakan publik lebih dipengaruhi oleh loyalitas personal daripada kepentingan masyarakat luas. Kondisi ini tentu bertentangan dengan semangat demokrasi yang menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan kesempatan yang setara bagi semua warga negara.²

Pendekatan afirmatif (*affirmative action*) menawarkan kerangka strategis untuk mengatasi problem politik dinasti melalui kebijakan yang bersifat proaktif dan sementara. Secara umum, *affirmative action* dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kelompok yang kurang terwakili dalam struktur politik, dengan tujuan menciptakan persaingan yang lebih adil dan setara.³ Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an selaras dengan semangat *affirmative action*. Nilai keadilan (*al-'adl*) mendorong distribusi kekuasaan secara merata, nilai amanah memastikan bahwa kekuasaan hanya dipegang oleh orang yang layak dan berintegritas, sedangkan prinsip musyawarah (*asy-syura*) menegaskan pentingnya partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Integrasi nilai-nilai ini dapat menjadi fondasi moral dan etis dalam merancang kebijakan pencegahan politik dinasti, sehingga demokrasi Indonesia tidak hanya berdiri di atas kerangka hukum positif, tetapi juga pada landasan nilai keagamaan yang kuat.

Penerapan *affirmative action* berbasis nilai Qur'ani di Indonesia dapat mengambil bentuk kebijakan konkret, seperti pembatasan masa jabatan bagi kerabat pejabat aktif, peningkatan keterwakilan perempuan dan kelompok muda di legislatif, serta mekanisme rekrutmen politik yang mengutamakan kapabilitas dan rekam jejak integritas. Kebijakan semacam ini dapat diperkuat melalui regulasi partai politik yang mewajibkan seleksi

² Agus Dedi, "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi," *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 2596, doi:10.25157/moderat.v8i1.2596.

³ Hendri Sayuti, "Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)," *Menara Riau: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 12, no. 1 (2013): 43.

terbuka bagi calon kepala daerah atau legislatif,⁴ sehingga memperkecil peluang penunjukan kandidat hanya berdasarkan hubungan keluarga. Dengan mengacu pada prinsip Qur'ani, kebijakan afirmatif akan memiliki legitimasi moral yang lebih kuat di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam, sekaligus menjawab kritik bahwa pencegahan politik dinasti bertentangan dengan hak politik warga negara.

Selain itu, integrasi nilai-nilai afirmasi Qur'ani juga dapat berperan dalam membentuk kesadaran politik masyarakat. Pendidikan politik berbasis nilai keadilan, amanah, dan musyawarah dapat diintegrasikan dalam kurikulum sekolah, program dakwah, dan media publik untuk menumbuhkan budaya politik yang menolak praktik kekuasaan turun-temurun. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa pencegahan politik dinasti tidak hanya dilakukan melalui instrumen hukum, tetapi juga melalui transformasi nilai dan budaya politik. Dengan demikian, kebijakan afirmatif tidak berhenti pada aspek teknis peraturan, melainkan menjadi gerakan kolektif yang berlandaskan etika Qur'ani demi tercapainya demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Pendidikan kepemimpinan berkelanjutan menjadi wahana strategis dalam penerapan tindakan afirmatif Qur'ani. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menjadi modal utama bagi perkembangan dan kemajuan suatu bangsa.⁵ Melalui pendidikan yang berkualitas, sumber daya manusia dapat dibentuk menjadi generasi yang berpengetahuan, terampil, dan berkarakter. Hal ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang mampu bersaing di tingkat global sekaligus berkontribusi dalam pembangunan nasional secara berkelanjutan.⁶

Proses ini tidak sebatas memberikan keterampilan teknis dalam memimpin, tetapi juga membentuk karakter, visi, dan komitmen pemimpin terhadap nilai-nilai Qur'ani. Melalui pendidikan yang terstruktur dan berkesinambungan, generasi baru pemimpin dapat disiapkan untuk mengambil peran secara kompeten di berbagai tingkatan, sehingga mampu bersaing secara sehat tanpa harus bergantung pada jaringan keluarga atau dinasti

⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987), 103.

⁵ HENI WIDIASTUTI and MUH. HANIF, "Kepemimpinan Transformasional Inovatif Berkelanjutan Melalui Madrasah Sociopreneurship Untuk Menyongsong Tantangan Pendidikan Modern Di Man 3 Banyumas," *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 4, no. 2 (2024): 178, doi:10.51878/cendekia.v4i2.2954.

⁶ Muh. Syilfa Nooviar et al., "Integrasi Kearifan Lokal Suku Bugis Dalam Pendidikan: Membentuk Karakter Dan Pengembangan Kepemimpinan Berkelanjutan Di Sekolah," *Jurnal Riset Dan Inovasi Pembelajaran* 4, no. 3 (2024): 2031, doi:10.51574/jrip.v4i3.2143.

politik. Dengan model ini, pencegahan politik dinasti bukan hanya dilakukan secara reaktif melalui regulasi, tetapi juga secara proaktif melalui pembentukan kader pemimpin yang unggul dan berintegritas.

Kepemimpinan dalam bidang pendidikan menghadapi tantangan khusus di era modern. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, dinamika perubahan sosial, serta arus globalisasi menuntut sosok pemimpin pendidikan yang tidak hanya adaptif, tetapi juga mampu menjaga nilai-nilai Islam. Seorang pemimpin pendidikan diharapkan dapat membangun iklim belajar yang kondusif, inklusif, dan berfokus pada pembentukan karakter. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia yang menggarisbawahi pentingnya pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh, mencakup dimensi spiritual, intelektual, emosional, dan sosial.⁷

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) sebagai kerangka utamanya. Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada penelusuran, analisis, dan sintesis konsep-konsep Qur'ani terkait tindakan afirmatif, pendidikan kepemimpinan, dan pencegahan politik dinasti. Data yang dikaji berasal dari sumber-sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, yang relevan dengan tema penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menafsirkan secara mendalam keterkaitan antara nilai-nilai Qur'ani dan strategi pendidikan kepemimpinan berkelanjutan dalam konteks sosial-politik kontemporer.

Sumber data primer penelitian ini meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan prinsip keadilan, amanah, meritokrasi, dan larangan ketidakadilan dalam kepemimpinan. Sumber data sekunder mencakup buku, artikel jurnal, disertasi, dan laporan penelitian yang membahas konsep tindakan afirmatif, pendidikan kepemimpinan, dan politik dinasti, baik dari perspektif Islam maupun kajian ilmu politik modern.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*). Melalui teknik ini, setiap ayat yang relevan dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema kunci yang terkait dengan tindakan afirmatif Qur'ani. Selanjutnya, tema-tema tersebut dikaitkan dengan

⁷ Sulisniati and Zainal Efendi Hasibuan, "Dasar Kepemimpinan Pendidikan Dalam Al- Qur'an Dan Hadist," *AMI-Jurnal Pendidikan Dan Riset* 3, no. 1 (2025): 10.

konsep pendidikan kepemimpinan berkelanjutan dan upaya pencegahan politik dinasti. Analisis ini dilakukan secara integratif, sehingga menghasilkan gambaran konseptual yang utuh tentang bagaimana nilai-nilai Qur'ani dapat diimplementasikan dalam pembentukan kepemimpinan yang sehat dan berkelanjutan.

Keabsahan data dijaga melalui *triangulasi sumber*, yakni dengan membandingkan penafsiran ayat dari berbagai kitab tafsir, serta mencocokkan temuan dengan literatur akademik yang relevan. Selain itu, dilakukan *cross-check* terhadap sumber-sumber ilmiah untuk memastikan validitas informasi yang digunakan. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis, baik dalam ranah studi tafsir tematik maupun dalam perumusan strategi pendidikan kepemimpinan yang efektif untuk mencegah politik dinasti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik dinasti merupakan fenomena di mana kekuasaan politik diwariskan atau dilanjutkan oleh anggota keluarga atau kerabat dekat, sering kali tanpa mempertimbangkan kelayakan kompetensi dan integritas. Dalam konteks demokrasi, praktik ini kerap dipandang sebagai distorsi terhadap prinsip persaingan yang adil (*fair competition*) dan meritokrasi. Di Indonesia, politik dinasti tidak hanya muncul di tingkat nasional, tetapi juga mengakar di pemerintahan daerah, terutama pasca diberlakukannya otonomi daerah. Dominasi politik oleh keluarga tertentu berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan, menutup kesempatan bagi talenta baru, serta menurunkan kualitas kebijakan publik karena terjebak pada kepentingan kelompok sempit.⁸

Fenomena politik dinasti juga memunculkan berbagai persoalan etika dan tata kelola pemerintahan. Konsentrasi kekuasaan di lingkaran keluarga berisiko menciptakan praktik kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang yang mengabaikan kepentingan publik. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung bias terhadap kelompok tertentu, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan lembaga pemerintahan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan legitimasi demokrasi dan memicu apatisme politik di kalangan warga negara.

⁸ Ruri Maydani et al., "Politik Dinasti Di Negara Demokrasi," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 3 (2024): 952, doi:10.46799/jsa.v5i3.1075.

Selain itu, politik dinasti menjadi tantangan bagi upaya mewujudkan kepemimpinan yang berbasis kompetensi dan visi jangka panjang. Regenerasi kepemimpinan yang sehat seharusnya memberi ruang bagi individu-individu berintegritas yang lahir dari proses seleksi terbuka dan persaingan sehat atau yang disebut dengan meritokrasi.⁹ Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah afirmatif yang tidak hanya membatasi praktik politik dinasti, tetapi juga mendorong pembinaan kader kepemimpinan yang berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi dan kepentingan bangsa. Langkah ini mencakup penguatan regulasi, pendidikan politik bagi masyarakat, serta penegakan etika publik yang konsisten di semua tingkatan pemerintahan.

Dalam merespons persoalan politik dinasti, diperlukan suatu pendekatan etis yang mampu mendorong perubahan struktural secara santun dan berkeadaban. Salah satu pendekatan yang relevan ialah tindakan afirmatif, yakni kebijakan atau langkah yang memberikan keberpihakan kepada kelompok atau individu yang selama ini terpinggirkan atau tidak memperoleh akses setara dalam sistem yang dominan.¹⁰ Dalam praktik sosial-politik kontemporer, tindakan afirmatif umumnya diwujudkan melalui pemberian kuota, perlindungan hukum, atau fasilitas khusus bagi kelompok minoritas. Meski demikian, konsep ini tidak hanya dapat dimaknai dalam kerangka administratif atau legal-formal, tetapi juga dapat ditopang oleh nilai-nilai spiritual yang mendalam.

Pelaksanaan strategi afirmatif dimulai dengan mengidentifikasi sektor-sektor yang masih mengandung praktik diskriminasi secara signifikan. Setelah itu, dirumuskan sasaran afirmasi yang berpijak pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi yuridis. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mengatasi kesenjangan, memperluas akses yang setara, mendorong inklusivitas, serta memperbaiki ketidakadilan historis melalui berbagai bentuk intervensi kebijakan yang berpihak.¹¹

Perbedaan mendasar antara tindakan afirmatif umum dan tindakan afirmatif Qur'ani terletak pada pijakan nilai serta arah tujuannya. Dalam sistem sekuler, tindakan afirmatif

⁹ Kamal Sulaiman et al., "Sistem Meritokrasi Dalam Upaya Penerapan Good Governance Di Indonesia" 8, no. 3 (2025): 2.

¹⁰ Nicole M. Lederer, "Affirmative Action: A Never-Ending Story, Dissertation" (Law School Faculty of Professions the University of Adelaide, 2013), 20.

¹¹ Nurkholis, "Politik Kekuasaan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kritik Terhadap Pemikiran Khilāfah Di Indonesia Melalui Pendekatan Affirmative Action)" (Institut PTIQ Jakarta, 2021), 112.

disandarkan pada asas keadilan sosial yang bersifat fungsional dan berlandaskan konstitusi. Sebaliknya, dalam perspektif Al-Qur'an, tindakan afirmatif berpijak pada prinsip tauhid, amanah, dan keadilan yang memiliki dimensi spiritual dan transendental. Orientasi akhirnya tidak hanya sebatas menciptakan keseimbangan sosial, melainkan juga mewujudkan kemaslahatan umat dan memperoleh ridha Allah. Dengan demikian, pendekatan Qur'ani dalam mencegah politik dinasti tidak hanya berfokus pada penolakan terhadap pewarisan kekuasaan, tetapi juga pada pembentukan sistem kepemimpinan yang adil dan memiliki tanggung jawab moral.

Pendidikan kepemimpinan berkelanjutan menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan tindakan afirmatif Qur'ani dalam pencegahan politik dinasti. Pendidikan ini mencakup proses pembinaan yang terencana, sistematis, dan berlangsung secara terus-menerus, bertujuan untuk mencetak pemimpin yang memiliki kompetensi manajerial, kapasitas intelektual, dan integritas moral. Dalam perspektif Qur'ani, kepemimpinan tidak hanya diukur dari kecakapan mengatur, tetapi juga dari keteguhan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Melalui program pendidikan yang mengintegrasikan ajaran Qur'ani, nilai-nilai amanah, musyawarah, dan tanggung jawab dapat ditanamkan sejak dini, sehingga lahir generasi pemimpin yang siap bersaing secara sehat tanpa harus bergantung pada jaringan politik berbasis keluarga.

Implementasi pendidikan kepemimpinan berkelanjutan menuntut keterlibatan berbagai pihak, mulai dari lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga institusi pemerintahan. Kurikulum yang dirancang tidak hanya menekankan pada penguasaan keterampilan teknis kepemimpinan, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai Qur'ani yang menekankan kejujuran (*sidq*), keadilan (*'adl*), dan pelayanan kepada masyarakat (*khidmah*). Sejalan dengan Qs An-Nisa ayat 58 bahwa pemimpin harus senantiasa amanah.¹² Dengan demikian, proses pembelajaran tidak terjebak pada orientasi pragmatis semata, tetapi membentuk pola pikir dan sikap kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan publik.

Selain pembelajaran di ruang kelas, pendidikan kepemimpinan Qur'ani juga perlu diperkaya dengan praktik lapangan yang memberikan pengalaman langsung dalam

¹² Muhammad Muhammad Abdul Lathif bin Al-Khatib, *Awdhah Al-Tafasir* (Al-Mathba'ah al-Mishriyyah wa Maktabatuhā, 1964), 519.

mengelola amanah publik. Keterlibatan mahasiswa, kader, atau calon pemimpin dalam kegiatan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan simulasi pengambilan keputusan berbasis musyawarah dapat menjadi media pembentukan karakter yang efektif. Prinsip musyawarah ini ditegaskan dalam firman Allah:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka" (QS. ash-Shūrā [42]: 38). Pengalaman ini tidak hanya melatih kemampuan manajerial, tetapi juga menumbuhkan empati, kepedulian, dan kesadaran akan tanggung jawab moral seorang pemimpin. Secara etimologis, *syūrā* atau *al-masyūrah* berarti nasihat, saran, atau pendapat yang diberikan.¹³ Adapun secara terminologis, istilah ini mengacu pada proses saling bertukar pandangan di antara beberapa pihak untuk memperoleh keputusan yang paling tepat.¹⁴ Istilah tersebut memiliki analogi seperti mengambil madu dari sarang lebah, yang mengandung makna memilih hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dalam praktiknya, musyawarah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling mengemukakan ide dan pandangan, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan penuh kebijaksanaan.¹⁵

Dalam konteks pencegahan politik dinasti, pendidikan kepemimpinan berkelanjutan berfungsi sebagai mekanisme regenerasi yang sehat. Dengan menyediakan jalur kaderisasi yang terbuka dan berbasis prestasi, peluang bagi munculnya pemimpin dari berbagai latar belakang dapat diperluas. Hal ini sejalan dengan semangat Qur'ani yang menolak monopoli kekuasaan dan mendorong keterlibatan kolektif dalam proses kepemimpinan. Dengan demikian, lahirlah pemimpin-pemimpin yang tidak hanya kompeten dan berintegritas, tetapi juga bebas dari ketergantungan pada struktur politik berbasis kekerabatan yang sempit.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997), 750.

¹⁴ Ar-Raghib al-Asfahani Al-Husain bin Muhammad bin Mufadhal, *Mu'jam Mufradat Al-Alfadz Alquran* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2010), 203.

¹⁵ Ja'far Muttaqin and Aang Apriadi, "Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 58, doi:10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18.

Pendidikan kepemimpinan berkelanjutan menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan tindakan afirmatif Qur'ani dalam pencegahan politik dinasti. Berikut ialah Langkah-langkahnya :

1. Formulasi Pendidikan Kepemimpinan Berkelanjutan Berbasis Qur'ani.

Pendidikan kepemimpinan berkelanjutan berbasis Qur'ani menekankan pembinaan yang terstruktur, sistematis, dan berlangsung dalam jangka panjang, sehingga mampu membentuk pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, dan visi kemaslahatan umat. Proses ini tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis kepemimpinan, tetapi juga pada penanaman nilai-nilai amanah, musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus diemban dengan penuh kesadaran spiritual dan komitmen terhadap kepentingan publik.

Landasan Qur'ani bagi model ini dapat ditemukan dalam firman Allah (an-Nisā': 58) yang memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Ayat ini memberikan prinsip utama bahwa kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak layak secara moral maupun kompetensi. Oleh karena itu, pendidikan kepemimpinan berbasis Qur'ani berperan sebagai mekanisme preventif terhadap praktik pewarisan kekuasaan yang mengabaikan meritokrasi, sekaligus menjadi sarana membentuk generasi pemimpin yang siap menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpijak pada nilai ilahi. Sebagaimana pemlihan Allah kepada Thalut dalam kepemimpinan Bani Israil.¹⁶

Implementasi nilai-nilai tersebut dalam pendidikan kepemimpinan mencakup proses seleksi, kurikulum, dan metode pembinaan yang berorientasi pada penguatan integritas dan kapasitas profesional calon pemimpin. Seleksi dilakukan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi berdasarkan kemampuan, bukan garis keturunan. Kurikulum dirancang untuk mengintegrasikan studi tafsir ayat-ayat kepemimpinan, pelatihan manajemen strategis, dan pembinaan spiritual, sehingga tercipta pemimpin yang mampu memadukan visi Qur'ani dengan tuntutan praktis dunia modern.

¹⁶ Kementerian Agama Saudi Arabia, *At-Tafsir Al-Muyassar* (Majma' al malik Fahd li athba'ah Mushaf as-syarif, 2009), 40.

Dengan demikian, model ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan politik dinasti, tetapi juga sebagai strategi membangun ekosistem kepemimpinan yang sehat dan berkelanjutan. Pemimpin yang lahir dari sistem ini diharapkan memiliki kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan rakyat. Prinsip ini menumbuhkan budaya politik yang lebih bersih, kompetitif, dan berpihak pada kemaslahatan umum, sekaligus memperkuat posisi nilai Qur'ani sebagai fondasi etika kepemimpinan di tengah dinamika sosial-politik kontemporer.

2. Integrasi Tindakan Afirmatif Qur'ani dalam Pendidikan Pemimpin

Integrasi tindakan afirmatif Qur'ani dalam pendidikan pemimpin menempatkan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai standar moral dan etika yang menjadi landasan setiap proses pembinaan. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amānah*), dan musyawarah (*asy-syūrā*) tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga diinternalisasikan melalui pembiasaan, keteladanan, dan penguatan karakter. Dengan demikian, pendidikan kepemimpinan tidak berhenti pada pencapaian keterampilan teknis, melainkan mengakar pada pembentukan pribadi yang memiliki visi pelayanan publik, kepekaan sosial, dan integritas tinggi sesuai nilai wahyu.

Pendekatan ini memastikan bahwa calon pemimpin memenuhi dua kriteria utama yang ditekankan Al-Qur'an, yakni kelayakan moral (*ṣalāhiyyah akhlāqiyyah*) dan kapasitas kompetensi (*kifā'ah mihaniyyah*). Kelayakan moral menjamin bahwa kekuasaan dijalankan untuk kemaslahatan umat, sementara kapasitas kompetensi memastikan kebijakan yang diambil efektif dan berorientasi solusi. Sinergi keduanya akan menciptakan kepemimpinan yang kokoh, berkelanjutan, dan tahan terhadap godaan membangun kekuasaan berbasis politik dinasti.

Kelayakan moral (*ṣalāhiyyah akhlāqiyyah*) menjadi pilar pertama yang meneguhkan integritas seorang pemimpin. Al-Qur'an memberikan contoh ideal melalui kisah Nabi Yusuf yang dipilih karena sifat amanah dan kemampuannya,¹⁷ sebagaimana tertuang dalam firman Allah: “*Sesungguhnya aku adalah penjaga yang amanah dan berpengetahuan*” (QS. Yusuf [12]: 55). Nilai ini menegaskan bahwa tanpa fondasi akhlak

¹⁷ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Bayan* (Muassasah Risalah, 2000), 400.

yang kuat, kekuasaan rentan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk memperpanjang kekuasaan melalui jalur politik dinasti. Oleh karena itu, pendidikan kepemimpinan Qur'ani memprioritaskan pembentukan akhlak sebagai filter utama sebelum memberikan otoritas kepada seseorang.

Sementara itu, kapasitas kompetensi (*kifā'ah mihaniyyah*) memastikan bahwa pemimpin tidak hanya bermoral, tetapi juga mampu menjalankan tugas dengan efektif dan responsif terhadap tantangan zaman. Hal ini sejalan dengan QS. al-Qashash [28]: 26, yang menegaskan kriteria pemimpin sebagai “*orang yang kuat lagi dapat dipercaya*”. Kombinasi kekuatan (kompetensi) dan kepercayaan (moral) menjadi syarat mutlak untuk menciptakan kebijakan yang adil, inovatif, dan berpihak pada kepentingan publik. Dengan sinergi dua kriteria ini, kepemimpinan tidak hanya terhindar dari jebakan politik dinasti, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada maslahat umat.

3. Pendekatan Pencegahan Politik Dinasti melalui Pembinaan Karakter

Pendekatan pencegahan politik dinasti melalui pembinaan karakter menempatkan kualitas pribadi sebagai fondasi utama bagi seorang pemimpin. Dalam perspektif Qur'ani, kepemimpinan bukan sekadar jabatan atau warisan kekuasaan, tetapi amanah (*amānah*) yang hanya layak diemban oleh mereka yang memiliki integritas tinggi. Pembinaan karakter difokuskan pada penguatan nilai kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), dan sikap adil (*ʿadl*) sejak dini, sehingga terbentuk pemimpin yang tidak terjebak pada orientasi kekuasaan keluarga, melainkan pada kepentingan umat.

Melalui proses pembinaan karakter yang berkesinambungan, calon pemimpin dilatih untuk mengedepankan visi kolektif dan meritokrasi, bukan kepentingan personal atau dinasti politik. Hal ini selaras dengan pesan-pesan Qur'ani yang menolak segala bentuk kezaliman dan penyalahgunaan kekuasaan. Penanaman kesadaran bahwa kepemimpinan adalah medan pengabdian, bukan privilese, akan membangun mentalitas yang menolak praktik pewarisan jabatan secara eksklusif tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kelayakan.

Selain itu, pembinaan karakter yang terintegrasi dengan pendidikan kepemimpinan memungkinkan terciptanya regenerasi pemimpin yang sehat dan kompetitif. Sistem ini akan meminimalkan peluang terbentuknya oligarki politik, karena para calon pemimpin

lahir dari proses seleksi alami berbasis kualitas, bukan hubungan kekerabatan. Dengan demikian, pencegahan politik dinasti menjadi upaya preventif yang tertanam dalam diri pemimpin sejak awal pembinaannya, menjadikan mereka lebih siap menjaga amanah rakyat sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani.

D. KESIMPULAN

Pembinaan karakter kepemimpinan harus dirancang untuk melahirkan pemimpin yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kesadaran etis yang tinggi. Melalui pendidikan nilai Qur'ani, proses seleksi yang objektif, dan pengawasan publik yang transparan, mekanisme pencegahan politik dinasti dapat berjalan efektif. Upaya ini akan memastikan regenerasi kepemimpinan yang sehat, berorientasi pada pelayanan publik, dan selaras dengan visi keadilan sosial yang diajarkan Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dedi. "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi." *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 92–101. doi:10.25157/moderat.v8i1.2596.
- Al-Husain bin Muhammad bin Mufadhal, Ar-Raghib al-Asfahani. *Mu'jam Mufradat Al-Alfadz Alquran*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2010.
- Al-Khatib, Muhammad Muhammad Abdul Lathif bin. *Awdhah Al-Tafasir*. Al-Mathba'ah al-Mishriyyah wa Maktabatuhā, 1964.
- Arabia, Kementrian Agama Saudi. *At-Tafsir Al-Muyassar*. Majma' al malik Fahd li athba'ah Mushaf as-syarif, 2009.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Bayan*. Muassasah Risalah, 2000.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987.
- Maydani, Ruri, M. Faisal Husna, Sri Lili Winarti, Nurhamida Harahap, and Ardiansyah. "Politik Dinasti Di Negara Demokrasi." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 3 (2024): 950–55. doi:10.46799/jsa.v5i3.1075.
- Miftahuddin. "Politik Dinasti Perspektif Al-Qur'an (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/Puu-Xiii/2015)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2018.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997.
- Muttaqin, Ja'far, and Aang Apriadi. "Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 57–73. doi:10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18.
- Nicole M. Lederer. "Affirmative Action: A Never-Ending Story, Dissertation." Law School Faculty of Professions the University of Adelaide, 2013.
- Nooviar, Muh. Syilfa, Nur Syamsinar Munir, Sukarya Daud, and Ahmad Fadhil Satriady. "Integrasi Kearifan Lokal Suku Bugis Dalam Pendidikan: Membentuk Karakter Dan Pengembangan Kepemimpinan Berkelanjutan Di Sekolah." *Jurnal Riset Dan Inovasi Pembelajaran* 4, no. 3 (2024): 2029–40. doi:10.51574/jrip.v4i3.2143.
- Nurkholis. "Politik Kekuasaan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kritik Terhadap Pemikiran Khilâfah Di Indonesia Melalui Pendekatan Affirmative Action)." Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Sayuti, Hendri. "Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)." *Menara Riau: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 12, no. 1 (2013): 41–47.
- Sulaiman, Kamal, Oktav Prananda, Muhammad Iqbal Faedillah, Andrew Rearizky, Dimas Dwi Haryanto, Universitas Muhammadiyah Tangerang, and Kota Tangerang. "Sistem Meritokrasi Dalam Upaya Penerapan Good Governance Di Indonesia" 8, no. 3 (2025).
- Sulisniati, and Zainal Efendi Hasibuan. "Dasar Kepemimpinan Pendidikan Dalam Al-Qur'an Dan Hadist." *AMI-Jurnal Pendidikan Dan Riset* 3, no. 1 (2025): 9–14.
- WIDIASTUTI, HENI, and MUH. HANIF. "Kepemimpinan Transformasional Inovatif Berkelanjutan Melalui Madrasah Sociopreneurship Untuk Menyongsong Tantangan Pendidikan Modern Di Man 3 Banyumas." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 4, no. 2 (2024): 177–90. doi:10.51878/cendekia.v4i2.2954.